



DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor: DOKTEN-01/POKJA-1/PL.04.03/I/BSN-2024

Tanggal: 10 Januari 2024

untuk

Pengadaan

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR Map dalam
Rangka Layanan GPRS Conection

POKJA UKPBJ 1 TA. 2024

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Tahun Anggaran: 2024

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. UMUM

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
- 1.1. Kode RUP: 46585009.
 - 1.2. Nama paket pengadaan: Pekerjaan Perpanjangan *Data Service* Aplikasi *SAR MAP* dalam Rangka Layanan *GPRS Connection*.
 - 1.3. Uraian singkat paket pengadaan: Pekerjaan Perpanjangan *Data Service* Aplikasi *SAR MAP* dalam Rangka Layanan *GPRS Connection*.
 - 1.4. Nama Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - 1.5. Nama UKPB: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/UKPB Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - 1.6. Nama Pokja Pemilihan: POKJA UKPB 1 TA. 2024.
 - 1.7. Alamat Pokja Pemilihan: Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Jalan Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat
 - 1.8. *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: www.basarnas.go.id
 - 1.9. *Website* UKPB: www.basarnas.go.id
 - 1.10. *Website* SPSE: <https://lpse.basarnas.go.id/eproc4/>
2. **SUMBER DANA**
- Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun Anggaran 2024.

C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI

13.2 Bentuk Data Kualifikasi

a. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: NIB.
 - b. Bidang Usaha: (46512) Bidang Perdagangan Besar Piranti Lunak
 - c. Kualifikasi usaha: Non Kecil
2. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.

5. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menyetujui Surat Pernyataan peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan
 - h. pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

b. Syarat kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Perorangan

- 1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- 2) memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
- 3) mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi status Wajib Pajak
- 4) menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) menyetujui Pernyataan berisi:
 - a. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - b. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - c. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - d. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- c. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia (apabila diperlukan)
 - 1) Memiliki pengalaman:
 - a) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - a) Penyediaan barang pada divisi 61: Jasa perdagangan besar.
 - b) Penyediaan barang pada kelompok (grup) 611: Jasa perdagangan besar, kecuali atas dasar balas jasa atau kontrak
 - c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;
 - d) untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
 - 2) Ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) dikecualikan bagi pelaku usaha dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - 3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purnajual (jika diperlukan).

- a. Memiliki tenaga ahli di bidang : Tidak dipersyaratkan (jika diperlukan)
- b. Memiliki tenaga teknis/terampil di bidang (jika diperlukan) : Tidak dipersyaratkan
- c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan (jika diperlukan) : Tidak dipersyaratkan
- d. layanan purnajual (jika diperlukan) : Sesuai terlampir pada dokumen spesifikasi teknis yang diupload oleh user PPK.

**16. Penyampaian
Dokumen
Kualifikasi**

16.1 Jadwal pelaksanaan:

Pemberian Penjelasan Kualifikasi:
Hari: _____
Tanggal : _____
Waktu : _____

Pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi :
Hari/Tanggal : _____ s/d _____
Waktu : _____

Pemberitahuan Hasil Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi:
Hari: _____
Tanggal : _____
Waktu : _____